

PENCEGAHAN-DAN-PENANGGULANGAN-HIV/AIDS

2016

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 12, LD. 2016/NO. 12, TLD NO. 224

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

ABSTRAK : - Sebagai respons terhadap ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh HIV, yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan proses penularan yang sulit dikendalikan. Penyebaran HIV/AIDS terus meningkat tanpa mengenal batas sosial dan wilayah, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat kelembagaan, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peraturan ini ditetapkan untuk memberikan dasar hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara efektif di Kabupaten Ngawi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 75 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2007; Permenko Kesra No. 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.68/MEN/IV/2004; Permen Kesehatan No. 21 Tahun 2013; Permen Kesehatan No. 45 Tahun 2014; Perda Prov. Jawa Timur No. 5 Tahun 2004; Perda Prov. Jawa Timur No. 1 Tahun 2016; Perda Prov. Jawa Timur No. 2 Tahun 2016

- Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk tanggapan terhadap penyebaran HIV/AIDS yang semakin luas dan sulit dikendalikan. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan memiliki proses penularan yang kompleks, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta kelangsungan hidup manusia. Penyebarannya tidak mengenal batas sosial maupun wilayah dan mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS secara lebih efektif dan terstruktur.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2016.

- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

- Penjelasan 6 hlm.